



# PEDOMAN SISTEMATIKA LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**BerAKHLAK**  
Berprestasi Berkeadilan



**REFORMASI  
HUKUM**

**UNDUH LOCO  
PEMAJUAN  
NAR. ALASI MANUSA**

# DAFTAR ISI

---

## KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

### PENDAHULUAN

- Pengertian LKjIP
- Mengapa Perlu Disusun LKjIP
- Dasar Hukum LKjIP
- Tujuan

### PENYERAGAMAN SISTEMATIKA

- KATA PENGANTAR
- IKHTISAR EKSEKUTIF
- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II PERENCANAAN KINERJA
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
- BAB IV PENUTUP

### PENUTUP



**STANDARISASI  
LKjIP**

**PENDAHULUAN**



# LKjIP

(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun berjalan.



## Mengapa Perlu Disusun LKjIP

- ❑ Sebagai sarana pengukuran kinerja, keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program & kegiatan sesuai perencanaan/ sasaran yang telah ditentukan.
- ❑ Sebagai informasi dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan peningkatan kinerja di tahun mendatang.
- ❑ Bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada masyarakat publik.

## Dasar Hukum LKjIP

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : M.HH-01.PR.03 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

## Kendala Dalam Penyusunan LKjIP

- ❑ Satuan Unit Kerja masih menggunakan Format Laporan Bulanan
- ❑ Tidak membuat perbandingan capaian kinerja yang memadai
- ❑ Tidak membuat evaluasi dan analisis pencapaian kinerja.
- ❑ Tidak memuat akuntabilitas keuangan secara jelas yang dapat membandingkan tingkat capaian kinerja dengan tingkat penyerapan anggaran.

## Tujuan

Membangun persamaan persepsi dan pemahaman dalam penyusunan LKjIP, baik dari segi sistematika penyusunan maupun penentuan sasaran dan indikator kinerja yang diukur.





# PENYERAGAMAN SISTEMATIKA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK  
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : M.HH-01.PR.03 TAHUN 2023





Mengacu kepada KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.HH-01.PR.03 TAHUN 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat menyeragamkan sistematika penyusunan LKJIP di lingkungan satuan kerja sebagai berikut :

❑ Kata Pengantar

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan Laporan Kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi. Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan Laporan Kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi

❑ Ikhtisar Eksekutif

Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja

❑ Daftar Isi

❑ Daftar Tabel

❑ Daftar Gambar

❑ Bab I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

menyajikan penjelasan umum Organisasi

B. Tujuan, Fungsi dan Struktur Organisasi

menyajikan tugas, fungsi dan struktur organisasi secara lengkap.

C. Maksud dan Tujuan

menyajikan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

D. Aspek Strategis

menguraikan aspek yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

E. Isu Strategis

menguraikan Isu Strategis organisasi yang dapat menghambat pencapaian kinerja

F. Sistematika Laporan

menyajikan urutan dalam penyusunan laporan kinerja.

❑ Bab II. Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja.

B. Perjanjian Kinerja

menyajikan Perjanjian Kinerja yaitu lembar/Dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.



### □ Bab III. Akuntabilitas Kinerja

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

- Penjelasan Capaian per Indikator dalam PK Tahun berjalan
- Perbandingan Capaian Tahun berjalan dengan tahun sebelumnya
- Perbandingan Capaian Tahun berjalan dengan Target Jangka Menengah dalam dok. Renstra
- Perbandingan Capaian Tahun berjalan dengan Standar Nasional
- Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

#### B. Realisasi Anggaran

menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta membandingkannya dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

#### C. Capaian Kinerja Anggaran

- Nilai SMART
- Nilai IKPA

#### D. Capaian Kinerja Lainnya

- E-performance
- Target Kinerja
- E-monev Bappenas
- Kegiatan Prioritas Nasional

### □ Bab IV Penutup

#### A. Kesimpulan

menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi.

#### B. Saran

menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

#### Lampiran-lampiran

- Perjanjian Kinerja Tahun berjalan
- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang
- Lain-lain yang dianggap perlu



# PENUTUP



# PENUTUP



Pedoman sistematika penyusunan LKjIP ini merupakan upaya peningkatan pemahaman terkait Laporan Kinerja dan penyeragaman sistematika LKjIP di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat.

Kami berharap pedoman ini dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dokumen LKjIP serta dapat dijadikan acuan dalam menyusun Laporan Kinerja yang sesuai dengan KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.HH-01.PR.03 TAHUN 2023. Adapun data dan informasi yang disajikan dalam LKjIP seluruh satuan kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat dapat menjadi rujukan dalam menetapkan strategi dalam meningkatkan kinerja serta ketepatan penggunaan anggaran pada periode tahun selanjutnya.

